

BAB III

DINAMIKA KONFLIK KOREA

Secara geografis Semenanjung Korea yang terletak di antara negara-negara besar seperti Jepang, Cina, dan Rusia. Kondisi ini menempatkan kawasan ini sebagai jalur lintas perdagangan yang strategis. Dari sisi geopolitik, ekonomi, dan militer cukup strategis sebagai kawasan lintas perdagangan internasional. Kondisi yang strategis tersebut berdampak pada keamanan di wilayah tersebut. Sejarah mencatat bahwa Korea pernah mengalami lima kali masa penjajahan oleh China, bangsa Mongol, Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Soviet.

A. Perang Korea 1950-1953

Wilayah Semenanjung Korea menjadi area yang diperebutkan oleh dua negara yang memiliki pengaruh besar di dunia, yaitu antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Negara-negara besar yang menjadi tetangga Korea menjadikan Semenanjung Korea sebagai sasaran dalam upaya melakukan perluasan pengaruhnya serta menyebarkan kepentingan negara-negara tersebut. Mereka berupaya memberi pengaruh kebijakannya demi kepentingan strategis masing-masing negara. Berakhirnya Perang Dingin bukan berarti perang ideologi juga berhenti. Bahkan memunculkan persaingan baru antara Blok Barat dengan Blok Timur di kawasan Asia.

Daratan di Korea dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet dengan ideologi sosialis-komunisnya dan Korea Selatan yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat dengan ideologi kapitalis-liberalis. Pembagian wilayah tersebut sebagai perpanjangan aliansi antara Korea dengan negara sekutu saat Perang Dingin.

Korea terpecah menjadi dua bagian berdasar Perjanjian Postdam di tahun 1945. Terpecahnya Korea menjadi dua bermula pada kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Pada awalnya Amerika dan Uni Soviet menjadikan garis dermakasi antara Korea Selatan dan Korea Utara. Wilayah dermakasi itu sebagai batas wilayah untuk menerima tawanan-tawanan Jepang pasca perang, namun garis itu berubah fungsi menjadi garis dermakasi antara pertahanan Amerika dan Uni Soviet. Sehingga timbul konflik antara kedua negara yang bersaudara tersebut.

Konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan dimulai pada 25 Juni 1950 dan berakhir pada 27 Juli 1950. Ada sekitar 75.000 tentara Korea Utara menduduki wilayah 38° lintang utara pada batas antara wilayah perbatasan Korea. Pengumuman perang berawal dari pemimpin Korea Utara dengan menyiarkan pemberitahuan perang ke seluruh kota melalui radio Pyongyang. Militer Korea Utara melakukan provokasi dengan pelanggaran di perbatasan dan melakukan invasi. Serangan mendadak tersebut membuat warga Korea Selatan terkejut sehingga Korea Utara berhasil menduduki kota Chuchon, Ongjin, dan Kaesong. Setelah 3 hari invasi, Korea Utara berhasil menduduki Seoul sebagai ibu kota Korea Selatan.

Perang Korea tersebut tidak hanya sebatas perang antara dua negara, namun juga dilatar belakangi oleh sekutu dari masing-masing negara. Upaya Uni Soviet yang membantu Korea Utara dalam perang tersebut diketahui oleh Amerika, sehingga Amerika memilih untuk membantu sekutunya, Korea Selatan. Untuk menjaga agar Uni Soviet tidak melakukan perluasan kekuatan militer ke wilayah Selatan adalah dengan membahas tindakan yang harus dilakukan Amerika. Amerika merekomendasikan harus mampu menguasai Korea bagian Selatan hingga garis 38°. Amerika perlu mengupayakan agar Uni Soviet tidak memperluas pengaruhnya ke Selatan. Terlebih posisi Amerika dalam DK PBB sangat menguntungkan bagi Korea Selatan. PBB juga mendukung Korea Selatan dalam konflik tersebut. Amerika dan Korea Selatan mengadakan agresi oleh pihak Korea Utara ke Dewan Keamanan PBB.

Sebagai solusinya, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi untuk memerintahkan pihak Korea Utara agar menarik pasukan militernya hingga dari wilayah Korea Selatan. DK-PBB juga membentuk pasukan militer PBB dengan bantuan 16 negara dengan Amerika Serikat sebagai pemimpin pasukan militer PBB tersebut. Jenderal Douglas Mac Arthur ditunjuk sebagai komandan pasukan. Keenam belas negara tersebut meliputi Korea Selatan, Australia, Belgia, Kanada, Kolombia, Ethiopia, Perancis, Yunani, Belanda, Selandia Baru, Filipina, Afrika Selatan, Thailand, Turki, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Pasukan tersebut berhasil mendesak militer Korea Utara untuk mundur dan meninggalkan garis lintang 38°.

Pada 26 September 1950, pasukan PBB dan Korea Selatan berhasil merebut kembali kota Seoul. Keberhasilan itu menjadi dorongan semangat Korea Selatan untuk mengalahkan Korea Utara dan sebagai kekalahan bagi Uni Soviet. Sebagai sekutu dekat Uni Soviet, China tergerak untuk memantu Korea Utara dengan menyerang kembali musuh Korea Utara. Dengan bantuan tersebut, Korea Utara kembali meraih kemenangan dan mengusir pasukan PNN dari Pyongyang.

Situasi perang yang semakin tidak terkendali mendorong diadakannya perundingan gencatan senjata antara kedua negara. Perang Korea pada akhirnya membunuh sebanyak satu juta warga Korea, seperempat warga Cina, dan tiga puluh empat ribu warga Amerika Serikat. Meskipun sudah ada kesepakatan gencatan senjata di antara negara yang berkonflik tersebut, perlu diadakan sebuah perundingan guna mencegah perang semakin meluas. Sehingga pada 23 juni 1951, Jacob Malik sebagai wakil tetap Uni Soviet di PBB, menyatakan bahwa mereka bersedia melakukan perundingan serta segera mengirimkan wakil-wakilnya. Perundingan yang dilakukan diantaranya:

1. Perundingan Kaesong (10 Juni – 22 Agustus 1951)

Lokasi ini dipilih sebagai tempat perundingan Kaesong terletak pada 20 mil dalam garis pertahanan Korea. Perundingan ini

sebagai strategi RRC dalam menghambat gerakan pasukan PBB di Korea. Perundingan ini berlangsung selama tiga bulan dan mengalami kegagalan dalam kesepakatan dalam menentukan garis demokrasi karena kedua belah pihak saling menuduh.

2. Perundingan Panmunjom (23 Oktober – 27 Juni 1953).

Perundingan di Panmunjom adalah perundingan lanjutan dari sebelumnya yang mengalami kegagalan. Perundingan kedua ini lebih tenang dari yang sebelumnya karena Korea Utara dan Korea Selatan sama-sama mau menenangkan diri dalam perundingan. Dalam perundingan ini, Korea Utara mengusulkan garis demokrasi selebar 2 mil yang dijadikan sebagai wilayah bebas militer.

3. Gencatan Senjata

Pada 27 Juli 1953 diberlakukan gencatan senjata sebagai lanjutan dari kesepakatan dalam perundingan sebelumnya di Panmunjom. Sesuai kesepakatan, garis demarkasi militer yang memisahkan Korea ditentukan memanjang dari muara sungai Han. Sehingga perang Korea berakhir untuk sementara waktu dalam situasi tanpa letusan senjata. Dalam gencatan senjata ini, Korea juga dipecah menjadi dua bagian, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan dengan terpisahkan pada garis lintang utara 38°.

Perang Korea yang berlangsung selama tiga tahun ini memakan korban jiwa hampir tiga juta orang tewas. Pada 8 Agustus 1953, pakta pertahanan bersama antara Korea Selatan dan Amerika Serikat ditandatangani di Seoul oleh John Foster Dulles selaku Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Syng Man Rhee selaku Presiden Republik Korea Selatan. Perjanjian ini memberikan perlindungan atas Korea Selatan oleh Amerika apabila ada serangan dari luar.

Akibat dari gencatan senjata tersebut masih menyisakan permasalahan mengenai tidak jelasnya kesepakatan damai sehingga perselisihan antara Korea Utara dan Korea Selatan belum tuntas. Permusuhan kedua negara ini dipengaruhi persepsi masing-masing negara yang menganggap negara tetangga tersebut sebagai musuh

dan ancaman. Bagi Korea Utara, Korea Selatan merupakan ancaman utama. Terlebih dengan kehadiran Amerika Serikat yang membantu dan berupaya melindungi Korea Selatan. Bagi Korea Selatan, invasi saat perang Korea menunjukkan agresifitas Korea Utara dalam menyatukan Korea. Sehingga Korea Selatan menganggap keagresifitas tersebut merupakan ancaman yang sewaktu-waktu dapat bangkit kembali. Dengan situasi yang demikian, mengakibatkan tidak ada norma damai yang disepakati kedua negara untuk memperbaiki hubungan yang harmonis.

B. Senjata Pemusnah Masal Korea Utara

Ancaman senjata nuklir beberapa kali dilakukan oleh Amerika Serikat saat Perang Korea berlangsung. Hal tersebut mempengaruhi Korea Utara untuk mengembangkan senjata pemusnah masal tersebut. Program nuklir Korea Utara dimulai pada tahun 1956 dengan menandatangani perjanjian kerjasama penggunaan damai energi nuklir.

Korea Utara mengirimkan para ilmuwan dan teknisi ke Uni Soviet untuk mendapat pelatihan dalam program pengembangan nuklir tersebut. Namun, Korea Utara merasa teknologi Uni Soviet kurang maju untuk memproduksi senjata nuklir. Sehingga di tahun 1964, Korea mendekati China untuk mempelajari teknologi nuklir. Pada tahun yang sama, China telah berhasil menguji bom nuklir pertamanya. Namun, Korea Utara mendapat tanggapan dingin dari China.

Program nuklir Korea Utara dipengaruhi oleh pemikiran dan ambisi Kim Il Sung. Dimana pemimpin Korea Utara itu terkesan dengan kekuatan dari pengeboman yang dilakukan Amerika terhadap Jepang. Yaitu pada pengeboman yang mampu meruntuhkan Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Saat Perang Korea, Amerika sempat mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir untuk mematahkan dan meredam agresifitas militer Korea Utara. Hal ini membuat Kim Il Sung terkejut dan membayangkan ketakutan apabila Korea Utara benar-benar menjadi sasaran senjata nuklir Amerika. Korea Utara merasa terpojok dengan ancaman tersebut terlebih

Amerika adalah sekutu Korea Selatan. Dalam perspektif Korea Utara, dengan memiliki senjata nuklir Korea Utara dapat menjadi penyeimbang kekuatan Korea Selatan yang bekerja sama dengan Amerika.

Pemimpin Korea Utra, Kim Il Sung memilih cara untuk mengembangkan kapabilitas rudal balistik sendiri. Di tahun 1965, Korea Utara mendirikan Akademi Militer Hamhung dan memulai pelatihan pengembangan rudal. Pada tahun yang sama, Uni Soviet memberikan bantuan kepada Korea Utara untuk membangun pusat penelitian untuk menjalankan reaktor nuklir berdaya 5MW di Yongbyon. Pengembangan nuklir tersebut difokuskan untuk mengembangkan bahan bakar nuklir.

Fasilitas nuklir di Yongbyon dimanfaatkan Korea Utara untuk terus mempelajari tentang pengembangan nuklir. Sehingga Korea Utara mampu mendapat plutonium dan mulai menguasai teknologi nuklir yang mendorong Kim Il Sung untuk membangun senjata nuklir. Korea Utara beranggapan bahwa nuklir tersebut akan membuat Korea Utara menjadi negara yang lebih kuat dari Korea Selatan. Selain itu, senjata nuklir dianggap mampu menangkal seranga Amerika dan memperkecil ketergantungan Korea Utara terhadap Uni Soviet dan China. Senjata nuklir dirasa mampu memberikan jaminan keamanan keamanan bagi Korea Utara.

Pada tahun 1960-an, Korea Utara mulai berusaha untuk meningkatkan kekuatannya dan berupaya memproduksi roket, rudal, maupun reaktor nuklir. Ada beberapa alasan Korea Utara mengembangkan kapabilitas rudal dan nuklirnya, diantaranya adalah untuk menangkal atau mengalahkan militer Amerika pada situasi konflik yang dianggap menghalangi Kim Il Sung menyatukan Korea melalui kekuatan militer. Pengembangan nuklir tersebut juga digunakan oleh Korea Utara untuk memperkuat aliansi dengan Uni Soviet dan China yang sering mengalami pasang surut.

Alasan lain Korea Utara ingin mengembangkan kapabilitas reaktor nuklirnya adalah untuk meningkatkan kemampuan militernya yang dianggap lemah. Militer Korea Utara lemah karena ideologi *Juche* yang dianutnya. Ideologi ini pertama kali dikenalkan oleh Kim

Il Sung ditahun 1955 sebagai ideologi resmi. Ideologi *Juche* diartikan sebagai kepercayaan diri yang lebih luas dan dipahami sebagai sikap mandiri dalam memenuhi kebutuhan negara tanpa bergantung dengan negara lain. Kim Il Sung menggunakan ideologi ini sebagai kontrol politik dalam mengatur kebijakan negaranya.

Program pengembangan nuklir Korea Utara ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kekuatan Korea Utara dalam mencapai posisi yang setara dengan Korea Selatan dan menambah kewibawaan dan pengaruh Korea Utara secara global. Nuklir ini juga digunakan sebagai saran untuk melakukan pemerasan agar mendapatkan keuntungan dari Korea Selatan dan sebagai upaya strategi penyeimbang terhadap persenjataan Korea Selatan. Tujuan utama dari pengembangan nuklir itu sendiri adalah untuk menaikkan posisi tawar atau *bargaining position* Korea Utara pada tingkat internasional. Senjata nuklir ini akan digunakan untuk menekan komunitas internasional agar melibatkan Korea Utara dalam oercaturan global serta memajukan kepentingan-kepentingan Korea Utara.

Sekitar tahun 1980, Korea Utara mulai mengurangi ketergantungan dalam mendapat bantuan senjata nuklir dari negara lain dalam melanjutkan program nuklirnya. Upaya Korea Utara dalam mengurangi ketergantungan dengan memproduksi uranium dan membangun reaktor nuklir sendiri secara rahasia yang dibangun di Yongbyon. Fasilitas ini mampu menghasilkan beberapa ratus ton bahan bakar dari seluruh reaktor. Keberadaan fasilitas ini ditemukan Amerika dan kemudian menuduh Pyongyang telah membangun reaktor nuklir secara raasia.

Temuan rahasia ini meningkatkan perhatian Korea Selatan, Amerika, dan Jepang. Pembangun reaktor nuklir secara rahasia ini diperkirakan memiliki sumber daya sebesar 50MW dan diklaim Korea Utara untuk penggunaan sipil. Tempat pengelolaan plutonium tersebut berada di tempat yang dekat dengan yang sebelumnya sehingga plutonium itu bisa digunakan untuk memproses bahan bakar nuklir. Setelah ditemukannya program rahasia Korea Utara ini memicu kecurigaan bagi negara disekitar kawasan Korea Utara termasuk Amerika.

Pada bulan April 1984, Korea Utara melaksanakan uji coba rudal Scud-B yang pertama. Pada uji coba rudal yang pertama ini, Uni Soviet menekan Korea Utara untuk bergabung dengan Nuclear Nonproliferation Treaty atau NPT dengan mengancam akan menghentikan bantuan ekonominya.



Gambar 3.4 Rudal Scud-B

Sumber : <http://missiledefenseadvocacy.org/missile-threat-and-proliferasi/scud-b/>

Pada tanggal 12 Desember 1985 Korea Utara bergabung dengan NPT dan menandatangani perjanjian untuk tidak menyebarkan nuklir. Namun, tidak lama setelah bergabung dengan NPT, Korea Utara mulai menunjukkan keberatannya pada isi perjanjian tersebut. Korea Utara tidak terima pada pengawasan secara menyeluruh terhadap semua aktivitas nuklir yang dilakukannya Korea Utara selamam tujuh tahun. Di tahun 1986 Korea Utara melakukan operasi penyulingan uranium dan transformasi insteriak nuklir. Namun, pada tahun 1989 Korea Utara mulai membangun pabrik tenaga nuklir berkekuatan 200MW di Yongbyon dan terdeketsi oleh Amerika Serikat.

Korea Utara terus berupaya dalam mengembangkan reaktor nuklir untuk kepentingan negeranya. Beberapa instalasi nuklir dengan bahan dasar plutonium yang berusaha dioperasikan Korea Utara diantaranya adalah:

Reaktor dengan kapasitas 5MW yang mulai dioperasikan di tahun 1987. Instalasi ini mampu menghasilkan bahan bakar uranium sekitar 7kilogram plutonium tiap tahunnya. Namun, di tahun 1989 Korea Utara memutuskan untuk menutup reaktor ini selama tujuh puluh hari dan memindahkan 8.000 balok untuk diproses menjadi plutonium yang bisa dijadikan 4-6 senjata nuklir. Reaktor ini kembali dioperasikan pada bulan Februari 2003.

Dua reaktor besar yang diperkirakan memiliki kekuatan 50MW dan 200MW dibangun di Yongbyon dan Taechon sejak 1984. Menurut Duta Besar Amerika Serikat, Robert Gallucci, apabila kedua pabrik ini dioperasikan akan mampu memproduksi sebanyak 200kilogram plutonium dan menghasilkan sekitar 30 bom atom setiap tahunnya.

Pabrik pengelolaan plutonium yang bangunannya memiliki panjang mencapai 600 kaki dengan tinggi beberapa lantai. Pabrik ini akan memisahkan plutonium untuk dimasukkan ke hulu ledak ataupun struktur bom atom.

Dengan kemampuan Korea Utara dalam hal pengembangan reaktor nuklir tersebut, dianggap mampu mengancam stabilitas keamanan bagi negara-negara di sekitar kawasan Asia Timur dan juga dunia internasional termasuk Amerika Serikat. Sehingga beberapa negara perlu untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menanggapi kepemilikan nuklir milik Korea Utara. Beberapa negara seperti Korea Selatan juga bersiap-siap untuk melawan agresi dari Korea Utara yang sewaktu-waktu akan meluncurkan rudalnya ke Korea Selatan. Amerika juga semakin memperkuat aliansinya di negara kawasan Asia Timur terutama Korea Selatan dan Jepang.

Amerika menduga bahwa Korea Utara terus meningkatkan pengembangan reaktor nuklir dan membuat delapan hingga sepuluh bom nuklir. Diperkirakan plutonium yang dihasilkan telah menghasilkan beberapa bom. Situasi semakin rumit ketika pada 4 Juli

206 Korea Utara melakukan uji coba enam rudal termasuk rudal jarak jauh Taepodong-2. Sehingga DK PBB menjatuhkan sanksi ke Korea Utara atas uji coba rudalnya namun mendapat penolakan dari Korea Utara untuk menghentikan program nuklirnya.

Pada 9 Oktober 2006 Korea Utara kembali melakukan peluncuran rudal dan mengklaim bahwa uji coba itu aman dan sukses. Kemudian intelejen Amerika mengkonfirmasi bahwa klaim tersebut benar dan merupakan uji coba nuklir. Atas uji coba tersebut, DK PBB mengeluarkan resolusi 1718 yang menjatuhkan sanksi keuangan dan senjata agar Korea Utara mengeliminasi seluruh senjata nuklir, senjata pemusnah massal, dan rudal balistik.

Korea telah membuktikan bahwa kepemilikan senjata rudalnya tidak main-main. Bahkan Korea Utara juga memiliki senjata rudal balistik antar benua. Sepanjang tahun 1990, Korea Utara mencapai kemajuan secara bertahap dengan sukses dengan beberapa upaya uji coba rudal, diantaranya

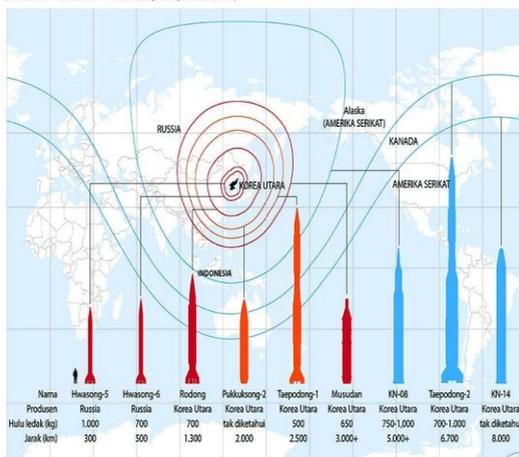
- a. Rudal Scud-C pada bulan Juni 1990
- b. Misil balistik Nodong-1 pada bulan Mei 1993
- c. Misil Taepo-Dong pada tahun 1998

Beberapa rudal yang dimiliki Korea Utara antara lain Scud B dengan daya jangkauan mencapai 320km dengan kemampuan daya muatnya 1.000 kg. Scud C dengan kapasitas daya jangkauan 500 km dan memiliki daya muat 770kg. Serta Nodong dengan daya jangkauan antara 1.350km hingga 1.500km dengan daya muat antara 770kg hingga 1.200kg.

Daya Jelaah Rudal Korea Utara

Uji coba nuklir adalah proses yang membuat Pyongyang lebih dekat kepada produksi hulu ledak nuklir yang bisa dimanfaatkan di rudal balistik antarabenua. Korea Utara punya lebih dari 1.000 misil berbagai ukuran. Grafik di bawah ini adalah perbandingan daya jelajah rudal balistik milik Korea Utara dan kemampuannya.

■ Beroperasi ■ Uji coba ■ Dalam pengembangan dan belum diuji



Catatan: Jarak KN-08 dan KN-14 dalam gambar di atas adalah jarak minimumnya. Taepodong-2 digiat mencapai jarak lebih jauh dengan muatan yang lebih ringan.
Sumber: The Republic of Korea Ministry of National Defense, National Intelligence Service, Korea Strategy Center for Strategic and International Studies (KSCIS), Reuters
C. In'ton, W. Cai, 24/03/2017



Gambar 3.5 Rudal Korea Utara dan Jarak Jelajahnya

Sumber : SIPRI.com

Menurut kantor berita resmi milik Korea Utara atau KCNA, Korea Utara telah berhasil dan sukses melakukan uji coba rudal balistik antar benua atau ICBM pada 28 Juli 2017. Menurut kantor berita tersebut, rudal balistik Korea Utara telah mengudara dengan kecepatan 47 menit 12 detik pada ketinggian 3.724,9 km dan terbang sejauh 998 km. Uji coba tersebut membuktikan bahwa rudal Korea Utara mampu menjangkau wilayah Amerika Serikat.



Gambar 3.6 Rudal Korea Utara

C. Perundingan Denuklirisasi Korea Utara

Dalam merespon kepemilikan reaktor nuklir milik Korea Utara, Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang paling dalam mengupayakan denuklirisasi Korea Utara. Upaya yang dilakukan oleh Amerika dan Korea Selatan adalah upaya perundingan damai dan mengupayakan agar Korea Utara bersedia untuk menghentikan pembanguna reaktor nuklirnya dan melakukan serangan uji coba rudalnya. Beberapa perundingan yang dilakukan dengan Korea Utara dalam upaya denuklirisasi diantaranya adalah

1. *Treaty of Reconciliatio and Nonaggression*

Perjanjian ini dilakukan oleh pihak Korea Selatan dan Korea Utara untuk menghentikan hubungan permusuhan dan bekerjasama sama dalam bidang keamanan. Perjanjian ini disepakati oleh kedua belah pihak pada 13 Desember 1991. Lima hari setelah perjanjian itu, tepatnya pada 18 Desember 1991, Presiden Korea Selatan Roh Tae Woo mendeklarasikan bahwa tidak ada senjata nuklir di Korea

Selatan yang sebelumnya telah dipindahkan oleh Amerika Serikat pada September 1991.

2. Joint Declaration of the Korean Peninsula

Korea Utara menerima perjanjian pengawasan oleh NPT untuk menerima inspeksi atas instalasi nuklir oleh IAEA. Perjanjian ini disepakati oleh Korea Utara pada 19 Februari 1992. Isi dari perjanjian ini adalah mengenai upaya untuk melakukan uji coba, membuat, memproduksi, mereima, memiliki, penyimpanan, menempatkan, dan atau menggunakan senjata nuklir. Kesepakatan ini tidak hanya disepakati oleh Korea Utara namun juga berlaku bagi Korea Selatan.

Dalam kesepakatan ini, IAEA akan melakukan enam kali inspeksi dan Korea Utara harus melaporkan kepemilikan material nuklir. Namun, berdasarkan satelit Amerika Serikat menemukan fakta bahwa yang dilaporkan Korea Utara tidak sesuai dengan data yang diberikan. Pihak IAEA meminta pemeriksaan khusus terkait laporan yang ada tetapi ditolak Korea Utara dan mengancam menarik keanggotaan dari NPT di tahun 1993.

3. Upaya negosiasi dengan melibatkan IAEA

Amerika berusaha melakukan upaya negosiasi dengan Korea Utara untuk bersedia dilakukan inspeksi oleh IAEA pada tahun 1994 dengan hasil penundaan Korea Utara untuk mundur dari NPT dan tetap menolak inspeksi IAEA. Amerika memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan Jepang dan Korea Selatan untuk menjatuhkan sanksi jika Korea Utara tetap bersikeras untuk tetap memproduksi plutonium. Korea Utara menafsirkan sanksi tersebut sebagai pernyataan perang dan mengancam untuk membunuh Korea Selatan. Atas ancaman Korea Utara tersebut, Amerika memutuskan untuk menambah pasukan militernya di Korea Selatan.

4. Agreed Framework

Upaya ini dilakukan sebagai usaha diplomasi terakhir untuk mengatasi krisis nuklir di Semenanjung Korea. Presiden Amerika, Kimmy Carter bertemu dengan Kim Il Sung di Korea Utara sebagai

upaya untuk menghindari perang. Dalam pertemuan tersebut tercipta negosiasi antara Amerika dan Korea Utara yang akhirnya dapat mengheentikan krisis nuklir dengan menghasilkan kesepakatan Jenewa atau *Agreed Framework* pada tahun 1994. Isi dari kesepakatan ini adalah untuk menghentikan program nuklir Korea Utara dengan membongkar pembangunan reaktor nuklir di Yongbyon.

Sebagai imbalannya, Jepang dan Korea Selatan bersedia untuk membangun reaktor air ringan dengan kapasitas 2.000MW dan Amerika akan menyediakan lima ratus ribu ton minyak solar tiap tahun untuk pemanasan dan pembangkit listrik tenaga air. Hubungan politik antara Amerika dan Korea Utara pun mulai mencair. Korea Utara juga memutuskan untuk melanjutkan keanggotaannya dalam NPT.

5. *Korean Peninsula Development Organization (KEDO)*

KEDO dibentuk sesuai dengan *Agreed framework* di tahun 1995 dengan tujuan untuk membangun dua areaktor air berkekuatan ringan yang disediakan Amerika sebagai imbalan atas penghentian reaktor nuklir Korea Utara. Markas besar KEDO berada di kota New York dan beranggotakan Korea Selatan, Amerika, Jepang, Inggris, Australia, Kanada, Brunei, Kuwait, Arab Saudi, Belgia, Philipina, Thailand, Italia, Malaysia, Singapura, Selandia Baru, dan Jerman. Namun, pada tahun 2002 krisis nuklir kembali terjadi dan membuat semua konstruksi terhenti.

Kunjungan delegasi Amerika ke Korea Utara terkait denuklirisasi

Kunjungan pada bulan Mei 1999, Amerika merekomendasikan dua hal bagi Korea Utara. Pertama, jika Korea utara akan menjalankan program nuklirnya, maka Jepang, Korea Selatan, dan Amerika akan menormalisasikan hubungan politik dan ekonomi termasuk menciptakan perdamaian antar negara. kedua, jika Korea Utara tidak menunjukkan untuk menghentikan pengembangan nuklir, maka Amerika, Jepang, dan Korea Selatan akan mengambil langkah tegas untuk menangkal ancaman nuklir tersebut.

Meskipun Korea Utara nampak tidak tertarik pada perundingan itu, namun kesepakatan itu tetap berjalan. Setelah Presiden Amerika diganti oleh George W. Bush, dia mengatakan bahwa akan merubah kebijakan tersebut sehingga kebijakan yang sudah ada itu terhenti selama satu setengah tahun.

6. *Six Party Talks*

Krisis nuklir yang kembali meningkat karena perselisihan antara Amerika dan Korea Utara menarik perhatian China untuk meningkatkan dan mengajak Korea Utara dalam perundingan multilateral. Perundingan ini berlangsung selama lima kali di Beijing. *Six party talks* ini melibatkan enam negara yaitu Amerika, Korea Utara, Korea Selatan, Cina, Jepang, dan Rusia. Selama tiga kali perundingan tidak menghasilkan sebuah perjanjian.

Pada pertemuan keempat menghasilkan beberapa titik temu. Korea Utara akan menghentikan program nuklir dan Amerika berjanji tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk menggulingkan rezim Korea Utara. Namun, setelah pertemuan berakhir, terjadi konflik antara Pyongyang dan Washington akibat perselisihan mengenai reaktor air. Washington menyatakan bahwa *disarmament* atau pelucutan senjata sebagai langkah pertama yang harus dilakukan Korea Utara dan akan mempertimbangkan permintaan Korea Utara mengenai pembangunan reaktor air ringan. Namun, menurut Pyongyang reaktor air tersebut harus disediakan terlebih dahulu sebelum *disarmament* dimulai.

Dalam putaran kelima *Six Party Talks* berlangsung pada tahun 2005. Kementerian Keuangan Amerika menyatakan salah satu bank yang memiliki rekening Korea Utara diduga menerima dana hasil pencucian uang oleh Korea Utara. Sehingga rekening dana milik Korea Utara dibekukan sekitar \$24 juta. Korea Utara mengancam tidak akan kembali melanjutkan *Six Party Talks* apabila rekening tersebut batal untuk dibekukan. Sementara itu, Korea Utara kembali melanjutkan program nuklirnya.

7. *Initial Actions for the Implementation of the Joint Statement*

Perjanjian ini sebagai lanjutan dari perundingan enam negara atau *six party talks* di Beijing pada bulan Februari. Perjanjian berisi penutupan dan penyegelan fasilitas Yongbyon, mendiskusikan daftar seluruh program nuklir Korea Utara. Perjanjian ini juga sebagai langkah awal bagi pembicaraan bilateral Korea Utara dengan Amerika dan Jepang, penyediaan 50.000 ton bahan bakar minyak bagi Korea Utara dalam jangka waktu 60 hari, serta pembentukan kelompok kerja untuk mendiskusikan implementasi perjanjian tersebut. Kelompok kerja tersebut adalah normalisasi hubungan Korea Utara-Amerika, denuklirisasi Semenanjung Korea, Normalisasi hubungan Korea-Jepang, kerjasama ekonomi dan energi, mekanisme perdamaian dan keamanan asia timur.

Pada 29 Januari 2002, George W. Bush menyatakan bahwa Korea Utara merupakan *an axis of evil* yang berarti bahwa Amerika tidak menginginkan adanya ikatan diplomatik dengan Korea Utara. Hal tersebut dilakukan Amerika karena mengetahui Korea Utara telah mengembangkan program nuklir yang lain. Program tersebut dilakukan secara terpisah dari lokasi di Yongbyon dan merupakan pengayaan uranium. Disisi lain, Korea Utara beranggapan bahwa negaranya berhak atas pengembangan nuklir karena sikap permusuhan yang ditunjukkan Amerika.

Krisis nuklir Korea Utara kembali meningkat pada bulan Oktober 2002 ketika Korea Utara secara tidak resmi menyangkal pernyataan asisten Menteri Luar Negeri Amerika James A Kelly yang menyatakan bahwa Pyongyang memiliki program pengayaan uranium dan telah melanggar perjanjian antara kedua negara. Kemudian memutuskan untuk menghentikan bantuan bahan bakar minyak pada Agreed Framework dan menghimbau Jepang dan Korea Sleatan untuk menghentikan pengerjaan reaktor air. Sebagai balasan, Korea Utara menolak inspektor IAEA yang berada di Yongbyon dan membuka kembali reaktor nuklirnya yang sempat ditutup serta akan kembali memproses bahan bakar untuk membuat nuklir.

D. Keterlibatan Amerika dalam Konflik Korea

Konflik yang terjadi Korea mengundang negara maju seperti Amerika Serikat untuk ikut terlibat dalam upaya damai. Korea Selatan sebagai sekutu dekat Amerika merasa keterlibatan Amerika mampu memperkuat kekuatan militernya. Korea Selatan menganggap bahwa Amerika sebagai negara maju memiliki kemampuan militer dan kecanggihan senjata yang mampu memperkuat sistem pertahanan Korea Selatan dari serangan Korea Utara. Bagi Korea Utara, kehadiran Amerika dalam konflik yang terjadi adalah sebuah ancaman dalam upaya Korea Utara menyatukan Korea.

Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Korea bermula pada Perang yang terjadi di Korea pada tahun 1950. Dalam perang tersebut, Amerika merasa perlu memberi dukungan kepada Korea Selatan atas dasar memperkuat aliansi dengan Korea Selatan sebagai sekutu dekat. Hubungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat telah terjalin sejak Perang Dingin. Namun, kelibatan Amerika dalam konflik yang terjadi di Korea juga didasari pada perang ideologi antara Amerika dengan Uni Soviet. Kedua negara ini sama-sama ingin memperluas pengaruh ideologinya di kawasan Asia Timur. Melalui keterlibatan kedua negara ini dalam konflik Korea diharapkan mampu menyebarkan ideologi mereka masing-masing.

Walaupun Perang Korea sudah mengalami gencatan senjata, hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan masih buruk. Beberapa konflik perselisihan masih kerap terjadi diantara kedua negara meskipun tidak terjadi perang seperti di tahun 1950. Korea Utara menganggap bahwa negara Korea Selatan adalah wilayah yang harus dikomunikasikan. Sedangkan Korea Selatan beranggapan bahwa wilayah Korea Utara adalah bagian dari Korea Selatan yang harus disatukan.

Pada tahun 1995, Amerika membuat perjanjian dengan Korea Utara yang dikenal dengan perjanjian Jenewa. Isi dari perjanjian ini adalah untuk menghentikan program pengembangan nuklir milik Korea Utara. Namun, di tahun 2002 Korea Utara kembali melanjutkan program nuklir tersebut. Menanggapi aksi Korea Utara,

pemerintah Amerika kemudian membuat kerjasama dengan Korea Selatan terkait pertahanan militer untuk memberikan jaminan payung nuklir atau *nuclear umbrella*.

Uji coba rudal yang dilakukan Korea Utara mengakibatkan Amerika dan Korea Selatan menempatkan pertahanan rudal di perbatasan sebagai aksi *nuclear deterrence*. Dalam berbagai perundingan Korea Utara kerap menyatakan akan menghentikan program nuklirnya, namun pada akhirnya Korea Utara akan tetap melanjutkan program nuklir di Yongbyon. Pada bulan Januari 2013, pemimpin Korea Utara pernah memberi pernyataan bahwa negaranya tidak akan melakukan denuklirisasi dan penghentian program nuklir apabila negara-negara lain yang memiliki nuklir tidak melakukan hal serupa.

Program pengembangan nuklir yang terus dilakukan Korea Utara membuat kewaspadaan keamanan negara di sekitar kawasan meningkat, sehingga Korea Selatan membuat kebijakan untuk meningkatkan pertahanannya. Korea Selatan melakukan aliansi pertahanan dengan Amerika Serikat dalam melindungi keamanan negara sekutunya. Peningkatan kapabilitas militer Amerika dan Korea Selatan meliputi:

Latihan militer dan perang gabungan Amerika dengan Korea Selatan yang dimulai sejak tahun 2001 hingga 2007 disekitar perbatasan.

Amerika Serikat memberikan bantuan militer dan membantu upaya peningkatan militer Korea Selatan. Upaya yang dilakukan Amerika adalah dengan penempatan pasukan militer Amerika di wilayah Korea Selatan. Amerika juga memberikan bantuan berupa kendaraan-kendaraan militernya khususnya kendaraan militer Angkatan Darat (*Army*), Angkatan Laut (*Navy*), dan Angkatan Udara (*Air Force*).

Keberadaan pasukan militer Amerika di Korea Selatan didasarkan pada analisis strategis Amerika. Keberadaan 100.000 personil Amerika terfokus untuk menyiapkan dan merespon keamanan dan stabilitas di kawasan Asia. Strategi Amerika menekankan pentingnya program latihan bilateral dan multilateral ke

negara sekutunya sebagai komitmen yang Amerika kepada Korea Selatan dalam membentuk koalisi yang efektif.

Keterlibatan Amerika dalam konflik di Korea adalah untuk meningkatkan keamanan yang menguntungkan dan di arahkan pada peningkatan kepentingan pengaruh Amerika. Keberadaan militer Amerika di dalam kawasan Korea Selatan tersebut menggandakan dampak diplomatik. Kombinasi keterlibatan politik, militer, ekonomi, dan sosial Amerika tersebut akan mewakili Pemerintah Amerika dalam menjamin dan mendorong perjuangan kebijakan dalam kepentingan Amerika dalam lingkup regional.

Kehadiran militer Amerika di Korea selatan adalah untuk menghadapi ancaman, khususnya ancaman nuklir dari Korea Utara. Semenanjung Korea masih menjadi area yang berbahaya di dunia. Pada Zona Demiliterisasi atau *Demilitarized Zona* (DMZ) terdapat 1,7 juta orang bersenjata, dimana dua pertiga lebih dari 1 juta anggota bersenjata Korea Utara ditempatkan pada wilayah DMZ. Pada awal 1990, Korea Utara menggelar lebih dari 3.500 tank dan sekitar 5.800 senjata. Jumlah persenjataan tersebut hampir menyamai jumlah persenjataan militer Amerika di seluruh dunia.

Menghadapi ancaman Korea Utara tersebut, pasukan militer Amerika Serikat tetap dipertahankan di Semenanjung Korea. Untuk menekan anggaran militer Amerika, Korea Selatan diharapkan lebih banyak menanggung biaya penetapan pasukan Amerika di negara tersebut. Dengan menanggung pengeluaran tenaga kerja lokal di pangkalan militer tersebut, Korea Selatan mendapat imbalan melalui perlindungan dari Amerika.